



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR 170/7/2024

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2025 dilaksanakan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
 - b. bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 dilaksanakan agar pembentukan Peraturan Daerah dapat terarah, terpadu, dan sesuai dengan skala prioritas;
 - c. bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 dilaksanakan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan dan disetujui dalam Rapat Paripurna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Juni 2024

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 170/7/2024
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

A. RAPERDA-RAPERDA

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KET.
				BARU	UBAH		NA	PENJ /KET			
1.	Perda	Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	✓		Permendagri Nomor 80 Tahun 2015	✓		Bapemperda DPRD	Tahun 2025	Luncuran Propemperda Tahun 2023
2.	Perda	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persetujuan Lingkungan serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	✓		1. UU Nomor 11 Tahun 2020 2. PP Nomor 22 Tahun 2021	✓		Bapemperda DPRD	Tahun 2025	Luncuran Propemperda Tahun 2023
3.	Perda	Badan Usaha Milik Desa	1. Pendirian 2. Kepemilikan Modal, Aset, dan Pinjaman 3. Unit Usaha 4. Kerja Sama 5. Pertanggungjawaban 6. Pembagian Hasil Usaha 7. Pembinaan dan Pengembangan	✓		1. UU Nomor 11 Tahun 2020 2. PP Nomor 11 Tahun 2021	✓		Komisi I DPRD	Tahun 2025	Luncuran Propemperda Tahun 2023

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KET.
				BARU	UBAH		NA	PENJ /KET			
4.	Perda	Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada Masyarakat	✓		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 2. Permendagri Nomor 71 Tahun 2012	✓		Komisi I DPRD	Tahun 2025	
5.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		✓	1. UU Nomor 11 Tahun 2020 2. PP Nomor 7 Tahun 2021	✓		Komisi II DPRD	Tahun 2025	Luncuran Propemperda Tahun 2023
6.	Perda	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Wonogiri	✓		1. UU Nomor 11 Tahun 2020 2. PP Nomor 121 Tahun 2015 3. PP Nomor 122 Tahun 2015	✓		Komisi II DPRD	Tahun 2025	Luncuran Propemperda Tahun 2023
7.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan		✓	1. UU Nomor 11 Tahun 2020 2. PP Nomor 29 Tahun 2021	✓		Komisi II DPRD	Tahun 2025	Luncuran Propemperda Tahun 2023

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KET.
				BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
8.	Perda	Penyelenggaraan Perhubungan	1. Analisis Dampak Lalu Lintas 2. Kendaraan 3. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4. Angkutan	✓		1. UU Nomor 11 Tahun 2020 2. PP Nomor 30 Tahun 2021	✓		Komisi III DPRD	Tahun 2025	Luncuran Propemperda Tahun 2023
9.	Perda	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Udara serta Pembinaan dan Pengawasan	✓		1. UU Nomor 11 Tahun 2020 2. PP Nomor 22 Tahun 2021	✓		Komisi III DPRD	Tahun 2025	Luncuran Propemperda Tahun 2023
10.	Perda	Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pengembangan dan penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan hak dasar penduduk miskin	✓		1. UU Nomor 13 Tahun 2011 2. PP Nomor 39 Tahun 2012 3. Perpres Nomor 166 Tahun 2014	✓		Komisi IV DPRD	Tahun 2025	Luncuran Propemperda Tahun 2023
11.	Perda	Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak	Langkah Preventif dan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak	✓		1. UU Nomor 23 Tahun 2002 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 3. Perpres Nomor 18 Tahun 2014	✓		Komisi IV DPRD	Tahun 2025	Luncuran Propemperda Tahun 2023

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KET.
				BARU	UBAH		NA	PENJ /KET			
12.	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan	✓		UU Nomor 23 Tahun 2014		✓	Bapperida	Tahun 2025	
13.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa		✓	UU Nomor 3 Tahun 2024		✓	Dinas PMD	Tahun 2025	
14.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Perubahan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa		✓	UU Nomor 3 Tahun 2024		✓	Dinas PMD	Tahun 2025	
15.	Perda	Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah	Kelembagaan Perangkat Daerah	✓		UU Nomor 23 Tahun 2014	✓		Bagian Organisasi Setda	Tahun 2025	
16.	Perda	Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah	1. Bentuk badan hukum; 2. Tata cara penyertaan modal; 3. Bentuk penyertaan modal; dan 4. Rincian penyertaan modal.	✓		UU Nomor 23 Tahun 2014	✓		Bagian Perekonomian dan SDA Setda	Tahun 2025	

B. DAFTAR RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No.	DAFTAR RAPERDA KUMULATIF TERBUKA
1.	Raperda Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Agung
2.	Raperda Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,


Sriyono
SRIYONO